Opini

Jawa Pos

Jati Diri

Final Ideal

ADA Lionel Messi. Ada Lamine Yamal. Yang satu juara bertahan, satunya lagi juga pernah jadi kampiun dunia. Dan, keduanya sama-sama jawara di konfederasi masing-masing yang kebetulan merupakan kiblat sepak bola sejagat.

Jadi, yang kecewa karena Prancis serta Inggris kalah, yang marah karena ketidakadilan yang dialami Mesir, yang jengkel karena tak lagi bisa menyaksikan Erling Haaland sekalipun, sulit untuk tidak menyebut duel Spanyol versus Argentina dalam partai puncak Piala Dunia 2026 sebagai final ideal.

Final pada Senin (20/7) dini hari WIB itu mempertemukan tim dengan kekuatan kolektif melawan tim yang dikomandani GOAT alias *greatest of all time*. Dengan sistem pertahanan tinggi dan transisi permainan yang cepat serta terstruktur, Spanyol membuat Prancis yang dipimpin Kylian Mbappe tak berkutik.

Di babak yang sama pula, kita bisa melihat kekuatan mental Argentina dan betapa krusialnya Messi. Tertinggal dari Inggris, Albiceleste membalik keadaan lewat dua gol yang dikreasi Messi.



DEDHIE RHADIU/JAWA POS

Sekarang kita tinggal berharap FIFA menunjuk ofisial pertandingan yang bisa konsisten menjalankan *laws of the game*. Bukan yang seperti beberapa kali terjadi di sepanjang Piala Dunia 2026: menghukum suatu tim karena pelanggaran tertentu, tapi tak menerapkannya pada tim lawan untuk kesalahan yang sama.

Video assistant referee (VAR) sebaknya bisa menghapuskan semua kecurigaan, tidak malah menumbuhkan kecurigaan baru. FIFA telah banyak mengecewakan penggemar sepak bola di seluruh dunia dengan berbagai kebijakannya di sepanjang ajang akbar empat tahunan ini.

Semoga di final, yang tersaji adalah duel taktikal dan adu *skill* kelas tinggi. Bukan malah keputusan atau kejadian yang menimbulkan teka-teki. *May the best team win.* **(*)**

Bahasa, New Normal, dan Kesehatan Kita



Akhmad Idris
Dosen Bahasa Indonesia; Penerima BPI 2023 Program Doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang

DUNIA yang dipenuhi kedamaian, agaknya, sekarang tidak lagi dipandang normal karena kenormalan baru (*new normal*) adalah dunia yang justru dipenuhi kebohongan dan kebencian. Hal itu dapat dilihat dari sebaran hoaks yang bergulir setiap hari hingga ujaran kebencian yang tak kunjung berhenti.

Yang terbaru adalah hoaks foto uang sitaan polisi dari Café De'Clan serta tautan (palsu) bansos dari Kemensos. Sementara ujaran kebencian yang masih hangat adalah laporan ujaran kebencian oleh Mahkamah Adat Alam Minangkabau atas tuduhan hinaan "barbar" oleh Abu Janda terhadap masyarakat Sumbar. Menengok sedikit ke belakang, ada *YouTuber* Resbob yang menghina suku Sunda.

Jika ditelisik lebih dalam, *new normal* dunia kita yang sekarang adalah dunia yang dibentuk dengan bahasa yang benar secara logika gramatika, tetapi gagal sebagai rumah untuk hidup bahagia bersama. Padahal, bahasa yang digunakan dengan baik dan benar tidak hanya berdampak pada relasi sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan fisikal.

Kenikmatan Fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif Resbob melakukan ujaran kebencian adalah keuntungan material yang didapat karena ulahnya akan viral di media sosial. Begitu juga tautan palsu bansos yang disebut dari Kemensos yang memang sengaja disebarkan pembuatnya untuk mendulang keuntungan dari masyarakat yang tertipu.

Secara garis besar, *new normal* dunia yang dipenuhi kebohongan dan kebencian terjadi karena manusia ingin mendapatkan kenikmatan fisik. Salah satu cara untuk mencapainya adalah memanfaatkan energi negatif bahasa –yang asalnya bersifat positif. Akhirnya, manusia cenderung hidup secara kompetitif daripada kooperatif.

Porat Antonius (2026) dalam karya mutakhirnya *Bahasamu Hidupmu atau Bahasamu Kematianmu* mengungkapkan, asal energi bahasa adalah positif. Namun, dalam praktiknya, manusia bisa saja memilih kebalikannya. Manusia tampil dengan *animal libido*-nya daripada potensi besarnya sebagai *homo socius*. Karena itu, manusia memandang manusia/makhluk lain sebagai musuh yang mengancam –dan satu-satunya pilihan adalah menghancurkan.

> Kebohongan dan kebencian terjadi karena manusia ingin mendapatkan kenikmatan fisik dengan memanfaatkan energi negatif bahasa –yang asalnya bersifat positif."

Tidak hanya sebagai musuh, manusia juga memandang manusia/makhluk lain sebagai sumber daya yang harus "ditumbalkan" agar hidupnya sendiri mendapatkan jaminan kebahagiaan. Jika sudah seperti itu, manusia lebih memilih energi negatif bahasa yang menghancurkan daripada energi positif bahasa yang menyatukan. Dari situlah muncul hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya.

Ketika energi negatif bahasa lebih menguasai daripada energi positifnya, manusia akan mengalami "kematian" sebelum telentang di dalam kuburan. Manusia bagaikan mati dalam hidup karena tak lagi saling percaya gegara hoaks tersebar di mana-mana.

Tidak ada lagi cinta dan berkah dalam hidup bersama karena kebersamaan terasa mengerikan. Setiap manusia berusaha menjadi hewan buas yang berebut kenikmatan. Padahal, bahasa pada asalnya digunakan sebagai energi positif untuk menamai, menyatukan, hingga mengubah keburukan menjadi kebaikan.

Dengan nama, manusia dapat mengenal dunia tanpa harus mendekati objeknya secara detail. Manusia dapat dengan bangga membicarakan patung manusia bertubuh singa meski belum pernah melihatnya secara langsung di Mesir gegara sebuah nama. Manusia juga dapat bersatu lintas ruang dan waktu lewat bahasa sebagaimana kita membaca teks tentang Tan Malaka meski hidup di ruang dan waktu yang berbeda.

Lebih dari itu, bahasa mengakrabkan hal yang asing seperti Jawa, Ambon, dan Papua yang tertawa bersama karena menggunakan bahasa yang dipahami bersama: bahasa Indonesia.

Pertanyaannya, masihkah kita ingin bertahan dengan *new normal* dunia yang menggunakan energi negatif bahasa?

Kesehatan Ideal

Hal selanjutnya yang sering luput dari manusia adalah anggapan bahwa kesehatan hanya diukur secara fisik. Padahal, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan secara menyeluruh berdasar aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual. Karena itu, pengobatan seharusnya tidak terbatas pada pengobatan secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan pengobatan jiwa.

Meski pendirian rumah sakit jiwa (RSJ) menjadi jawaban atas masalah itu, praktiknya, pengobatan dalam RSJ masih berbasis fisikal (tubuh). Pengobatan berbasis jiwa telah dibuktikan oleh Mona Lisa Schulz (2016) dalam *Heal Your Mind* yang menyebutkan bahwa kesehatan organ tubuh seperti liver dan lambung dipengaruhi oleh *feeling good*. Pikiran yang baik akan berdampak positif terhadap kesehatan tubuh.

Di sisi lain, bahasa dan berpikir adalah satu kesatuan. Pikiran merupakan isi dalam bahasa, sedangkan bahasa adalah alat yang mengekspresikannya menjadi deretan kata yang dapat ditangkap oleh manusia. Tanpa bahasa, pikiran hanya diketahui secara personal. Atas dasar itulah, kesehatan manusia juga ditentukan oleh bahasa dan cara berbahasa –yang baik dan benar dengan memanfaatkan energi positifnya.

Pandangan itu dapat dibuktikan lewat bahasa yang digunakan konselor dan klien-nya yang dapat diartikan bahasa mengubah sakit menjadi sehat.

Newberg & Waldman (2012) dalam *Words Can Change Your Brain* mengungkapkan, kata yang digunakan sebagai alat berpikir (maupun komunikasi) berpengaruh terhadap kesehatan otak. Seseorang yang menyusun bahasa untuk dirinya sendiri secara positif ternyata berhasil meningkatkan hormon kesenangan seperti serotonin atau dopamin.

Saat pikiran positif itu dikomunikasikan kepada orang lain, hormon yang sama akan mengalir ke tubuh dan otak orang lain tersebut. Pada akhirnya, bahasa membuat semua pihak sehat. **(*)**



MAHESA INDRA/JAWA POS

Pembaca Menulis

Dirugikan Paket Internet yang Tidak Wajar



ILUSTRASI DEDHIE RHADIU/JAWA POS

PADA 25 Juni 2026, saya membeli paket internet Indosat 35 GB. Mendadak pada 1 Juli, paket saya habis. Saya lalu membeli lagi 35 GB.

Pada 5 Juli, lagi-lagi paket saya habis. Saya kemudian membeli lagi 18 GB. Lalu pada 11 Juli, ada notifikasi bahwa paket internet saya habis lagi. Saya pun membeli lagi 55 GB.

Belum berhenti di situ. Pada 14 Juli, berselang 3 hari dari pembelian terakhir, paket saya hanya tersisa 5 GB. Seolah, dalam 4 hari, saya menghabiskan kuota hingga 50 GB. Padahal, penggunaan saya sangat wajar. Tidak bermain game atau menonton film. Semua data te-*record*.

Saya sudah mendatangi Indosat Gallery di Plasa Marina Surabaya. Namun, belum ada tindak lanjut. Saya merasa dirugikan. Total pengeluaran kuota saya sudah tidak wajar. Masak dalam sebulan bisa sampai 143 GB. Saya meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi dari Indosat.

Leanda Annisa,
Kutisari Indah Barat, Surabaya, 085648886xxx

Surat dikirim ke e-mail: **pmi@jawapos.co.id** atau WhatsApp: **0852 5989 2506.** Sertakan salinan KTP, alamat lengkap, dan nomor telepon.

Jawa Pos

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Eko Priyono
Wakil Pemimpin Redaksi: Andrianto Wahyudiono, Firzan Syahroni

Kepala Kompartemen:
Agung Kurniawan, Bisikono Yudho, Juneka Subaihul Mufid

Redaktur Senior: Tatang Mahardika

Redaktur: M. Ali Mahrus, Andri Teguh Pryantono, Anis Imam Maruhadi, Arizki Prasetyo Hadi, Arief Indra Dwisetyadi, Doni Nur Subagiyo, Nur Aini Roosilawati

Asisten Redaktur: Achmad Santoso, Eko Hendri Saiful, Galih Adi Prasetyo, Glendy Bunnama, Kris Kumiawan, Lugas Wicaksono, Maoria Pane, Nugroho Galih Wicaksono

Reporter: Ahmad Reza, Bagus Putra Pamungkas, Dian Wahyu Pratama, Edu Farida Lestari, Farid Satya Maulana, Febry Fendian, Ferlynda Putri Sofyandari, Hadyan Nandana, Rham Dwi Ridlo Wancoko, Juliana Christy Kakiray, Lakilaf Fitriani, Ludvi Argo Wismu, M. Azami Ramadhan, M. Hilmi Setiawan, M. Saiful Rohman, M. Sahabil Al Ibi, Muhtaminah, Nadya Amalia Meylani, Narendra Prasetya, Ramadhoni Cahya, Retno Dyah Agustina, Rizka Perdana Putra, Rizky Ahmad Fauzi, Septian Nur Hadi, Shafa Nadia, Sholeh Hilmi Qosim, Sugih Mulyono, Taufiq Ardiyansyah, Tazpia Aulia Zalzabillah, Wahyu Zanuar Bustomi, Yogi Wahyu Priyono, Zalzilatul Hikmia

Fotografer: Alfian Rizal (koordinator), Angger Bondan, Henung Hambara, Puguh Sujiatmiko, Salman Toyibi, Riana Setiawan

Desain Grafis dan Tata Artistik:
Aditya Rahman, Budiono, Herlambang Bintang, Imas Ayu, Isnina Aryani Hasanah

Sekretaris Redaksi: Dava Novianti
Manajer Praretak: M. Tova Maulana Irfan

Tim Liputan Iklan
Kepala Kompartemen:
Maheva Indra Wardhana

Asisten Redaktur:
Agus Wirawan, Kaveria Rahmani Utami
Reporter: Ani Setiyaningrum, Al Mushowwir

Iklan: Retno Palupi, Leanda Annisa Mesius, Ratih Kania, Rizka Mita, Vicky Ferandhika, Mochammad Sholeh
Manajer Pemasaran: Moh. Mansur

Penerbit: PT Jawa Pos Koran
Direktur Utama: Leak Kustiyo
Direktur Bidang Bisnis: David Arya
Direktur Bidang Pengembangan & Jaringan: Marsudi Nurwahid P.
Wakil Direktur Bidang HRD: Budy S. Marahap
Wakil Direktur Bidang Keuangan: Desy Andriani

Konsultan Hukum:
Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm)

Alamat Redaksi:
Graha Pena Lt 4 Jl. A. Yani 88, Surabaya, 60234

Jawa Pos Radar
Direktur Utama: Leak Kustiyo
Direktur: Marsudi Nurwahid P.
Wakil Direktur: Desy Andriani
Radar Malang: Taufiel Wijaya
Radar Kediri: Kurniawan Muhammad,
Radar Tulungagung: Aris Sudarsang
Radar Madiun: Marsudi Nurwahid P.,
Radar Bojonegoro: Bachtiar Febriardo,
Radar Tuban: Tulus Widodo, **Radar Mojokerto:** M. Nur Kholis, **Radar Bromo:** Ahmad Suyuti,
Radar Jember: Choliq Baya, **Radar Banyuwangi:** Samsudin Adlawi, **Radar Madura:** Abdul Aziz,
Radar Solo: Broto Rika Ariyani,
Radar Semarang: Baehaqi, **Radar Kudus:** Baehaqi,
Radar Jogja: Ananto Priyatno, **Radar Bali:** Justin M. Herman, **Radar Jombang:** M. Nur Kholis

Percetakan: PT Tempina Media Grafika
Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31, Wringinanom, Gresik
Telepon Redaksi: 031-8202240,
Fax: 031-8285555
Telepon Iklan: 031-8202254,
Fax: 031-8294573, **E-Mail:** iklan@jawapos.co.id
Telepon Pemasaran: 031-8202000,
Fax: 031-8250009
Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5389950, **Fax:** 021-5349207
E-Paper: http://digital.jawapos.co.id
E-Mail: editor@jawapos.co.id **Harga**
Langganan: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 150.000 **Jakarta:** Rp 140.000
Luar Pulau: Tambah ongkos kirim

Wartawan Jawa Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Jawa Pos dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas. Semua artikel dalam rubrik Komunikasi Bisnis/Politik/Pemerintahan/Pendidikan adalah pariwara. Semua artikel yang ditulis oleh Tim Liputan Iklan adalah pariwara.

Jati Diri

Menguji Urgensi URI

PEMERINTAH ingin melahirkan pemimpin masa depan. Resepnya: membangun universitas baru. Maka lahirlah Universitas Republik Indonesia (URI).

Namanya megah. Bahkan terdengar seperti kampus yang sudah berdiri sejak republik ini diproklamasikan.

Belum sempat publik memahami bentuk dan kewenangannya, pemerintah sudah melantik gubernur dan wakil gubernurnya. Ibaratnya, belum selesai desain gedungnya digambar, penghuni utamanya sudah menempati ruang kerja.

Pemerintah beralasan, URI dibangun untuk menciptakan sistem pembinaan pemimpin yang lebih terintegrasi. Inspirasinya datang dari Prancis melalui Institut National du Service Public, penerus École Nationale d'Administration (ENA).

Meniru program negara lain memang tidak salah. Namun, menyalin bangunan tanpa memahami fondasinya sering kali menghasilkan rumah yang miring.



DEDHE RHADI/JAWA POS

DPR mengaku belum pernah membahas dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. Padahal, dalam negara hukum, legalitas bukan pelengkap administrasi. Ia adalah fondasi yang tidak bisa disusulkan belakangan.

Indonesia sesungguhnya tidak memulai dari nol. Negara ini telah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang selama puluhan tahun mendidik aparatur sipil negara.

Ada pula Lemhannas yang menyiapkan calon pemimpin nasional melalui pendidikan strategi kebangsaan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bahkan juga menjalankan sebagian fungsi pembinaan karakter kebangsaan.

Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa URI berpotensi menjadi birokrasi baru yang menyedot anggaran. Sekaligus mempertebal elitisme dalam proses rekrutmen calon pemimpin. Sebagian kalangan juga mengkhawatirkan pendekatannya nanti lebih bercorak militer.

Pemerintah memang menyatakan bahwa URI akan mengintegrasikan sejumlah institusi, termasuk LAN. Artinya, tidak sekadar menambah lembaga baru. Jika benar demikian, publik berhak mengetahui desain kelembagaannya secara utuh. Hasil kajian akademik wajib dibuka dengan jelas.

Fungsi URI harus berbeda secara tegas dari LAN, Lemhannas, maupun perguruan tinggi kedinasan lainnya. Rekrutmen harus bertumpu pada meritokrasi, bukan kedekatan politik, privilese birokrasi, atau kemampuan ekonomi.

Yang tidak kalah penting, seluruh biaya pembentukan universitas itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Negara memang membutuhkan pemimpin baru. Dan itu hanya akan lahir dari sistem yang adil dan proses yang transparan. (*)

MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal **650** kata. Kirim ke: **opini_jpr@jawapos.co.id.** Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim.

Pengunduran Diri Gubernur BI



Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi; Ketua Badan Pertimbangan Fakultas FISIP Universitas Airlangga

KABAR mengejutkan datang dari Bank Indonesia (BI). Perry Warjiyo tiba-tiba mengundurkan diri dari kursi gubernur BI. Pengumuman resmi mundurnya Perry itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Meski pemerintah telah bertindak cepat, yakni memastikan posisi kepemimpinan tertinggi otomatis diisi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat sementara gubernur BI, tangan psikologis pasar bagaimanapun tetap tidak akan terhindarkan. Pelaku pasar tentu akan terus memantau apakah rotasi kepemimpinan BI itu mampu meredam volatilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

Alasan

Alasan pengunduran diri Perry masih menjadi tanda tanya di masyarakat. Namun, belajar dari pengalaman kasus pengunduran diri gubernur bank sentral di berbagai negara, ada dua alasan.

Pertama, terjadinya krisis ekonomi yang mengancam stabilitas sebuah negara. Jadi, pertimbangan pengunduran diri gubernur bank sentral sangat politis. Ia mengundurkan diri karena dipaksa keadaan.

Kasus di negara tetangga seperti Sri Lanka, misalnya. Pada 2022, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Ajith Nivard Cabraal memilih mundur ketika tekanan terhadap cadangan devisa dan gejolak sosial mencapai puncaknya, sesaat sebelum agenda penentuan kebijakan suku bunga penting.

Di Timur Tengah, kasus pengunduran gubernur bank sentral terjadi di Iran. Gejolak pasar keuangan dan kejatuhan nilai tukar riyal terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berujung pada terjadinya turbulensi di kantor pusat bank sentral. Tekanan inflasi yang melonjak tinggi serta protes di jalanan ibu kota membuat posisi kepala bank sentral berada di garis depan kemarahan publik. Situasi ekonomi domestik yang tertekan memaksa terjadinya pergantian kepemimpinan secara mendadak guna meredam kepanikan pasar dan instabilitas politik.

Alasan kedua adalah kepentingan negara untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik. Sebagai contoh, di Prancis, gubernur bank sentral mengundurkan diri bukan karena tekanan krisis atau kemarahan publik. Mundurnya Gubernur Bank Prancis François Villeroy de Galhau yang diumumkan lebih awal dari jadwal akhir masa jabatannya justru dibaca para pengamat sebagai langkah kalkulasi politik yang strategis. Dengan mundur sebelum pelaksanaan pemilu, langkah tersebut memberikan ruang bagi pemerintahan yang sedang berkuasa untuk menunjuk pengganti guna mengamankan arah kebijakan institusi keuangan utama dari ketidakpastian politik masa depan.

> Pengunduran diri Perry membuktikan bahwa posisi gubernur BI sarat pertarungan pengaruh antara kepentingan jangka pendek rezim politik dan stabilitas moneter jangka panjang.”

Di Indonesia, langkah dan alasan pasti pengunduran Perry belum diketahui. Namun, berdasar dugaan, keputusan itu berkaitan dengan kondisi ekonomi, khususnya kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah. Kita tentu telah melihat bahwa nilai tukar rupiah belakangan ini terus mengalami tekanan yang luar biasa. Nilai tukar rupiah di kisaran Rp 17.600 hingga Rp 18.150 per dolar AS telah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas harga barang impor, beban utang luar negeri, dan daya beli masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak baik-baik saja, pihak yang mendapat sorotan utama niscaya adalah gubernur BI. Kursi gubernur bank sentral adalah salah satu posisi paling panas di panggung makroekonomi global. Gubernur BI adalah orang yang memegang kendali atas suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Ketika berbagai kebijakan yang dikeluarkan BI seperti operasi moneter, lelang repo, hingga intervensi pasar dinilai tidak efektif mengatasi persoalan pelemahan rupiah, kritik pun bermunculan.

Tak kurang Komisi XI DPR melontarkan kritik keras dan mempertanyakan kinerja gubernur BI. Bahkan, ada sejumlah anggota DPR yang mengusulkan agar Perry mengundurkan diri karena gagal menjalankan amanah. Entah karena tekanan dari DPR yang meminta pertanggungjawaban moral dari gubernur BI ataukah karena alasan lain, Perry akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

Independensi

Fenomena pengunduran diri Perry tentu bukan sekadar urusan administratif, melainkan memiliki konsekuensi terhadap dinamika hubungan antara kekuasaan fiskal (pemerintah) dan independensi moneter (bank sentral). Belakangan ini, kita bisa melihat hubungan BI dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkesan kurang serasi. Meski ketika tampil di hadapan media massa mereka tampak serasi, suara-suara di luaran membicarakan bahwa relasi mereka tidaklah seharmonis yang tampak.

Sebagai bank sentral, posisi Bank Indonesia sesungguhnya harus independen. Di tengah dinamika ekonomi yang menuntut digulirkannya berbagai paket stimulus dan pengendalian inflasi yang seimbang, independensi adalah harga mati yang harus terus dijaga oleh siapa pun yang memegang kendali.

Namun, fakta di lapangan tidak selalu berjalan seperti idealnya. Dalam praktik, tidak sekali dua kali posisi BI seolah tersubordinasi. Alih-alih mempertahankan independensinya, BI justru kerap menjalankan peran tak ubahnya pemerintah, yakni ikut bertanggung jawab menjaga pertumbuhan ekonomi.

Mundurnya Perry membawa pesan ganda bagi pasar. Di satu sisi, pengunduran diri itu bisa dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atau imbas dari tekanan politik yang tak tertahankan. Di sisi lain, hal itu membuktikan bahwa posisi tersebut sarat pertarungan pengaruh antara kepentingan jangka pendek rezim politik dan stabilitas moneter jangka panjang.

Bagi publik dan investor, stabilitas institusi jauh melampaui figur individu. Siapa pun yang memegang kendali, marwah independensi bank sentral harus tetap dijaga agar bahtera perekonomian tidak oleng di tengah gelombang ketidakpastian global. (*)



WAHYESA PRIMA ALI JAWA POS

”Londo Ireng” dan Ongkos Mahal Diksi Kekuasaan



Mudhofir Abdullah
Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta

DIKSI *Londo ireng* yang diarahkan kepada pers, organisasi masyarakat sipil, kaum intelektual, dan kelompok kritis lain oleh Presiden Prabowo Subianto sangatlah berbahaya karena menyamakan mereka dengan pengkhianat. Secara historis, *Londo ireng* (Belanda hitam, *zwarte Hollanders*) merujuk pada ribuan serdadu asal Pantai Emas Afrika Barat (kini Ghana, terutama dari Elmina) yang direkrut tentara kolonial Belanda (KNIL) sejak 1831 guna menutup kekurangan personel akibat Perang Jawa 1825–1830.

Dalam perkembangannya, istilah itu meluas menjadi cap peyoratif bagi pribumi yang dianggap berpihak kepada penjajah dan mengkhianati bangsanya sendiri seperti antek, kolaborator, pembelot. Inilah beban sejarah yang diangkat diksi tersebut ketika dipakai untuk melabeli warga negara yang menjalankan fungsi kritik.

Stigmatisasi

Dampak pertama adalah stigmatisasi dan delegitimasi masyarakat sipil. Dengan mengatakan kritik dengan kepentingan asing tanpa bukti yang dapat diverifikasi, negara sedang melakukan sekuritisasi perbedaan pendapat. Kritik yang seharusnya dijawab dalam ruang debat demokratis justru dikonstruksi sebagai ancaman keamanan nasional. Perhatian publik dialihkan dari substansi kritik (misalnya, foto siswa menyantap makan bergizi gratis di dekat bangunan sekolah yang rusak yang disebut-sebut memicu keracunan) menuju serangan terhadap identitas dan motif pengkritiknya.

Dampak kedua adalah pelemahan kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak presiden meminta maaf secara resmi karena pelabelan itu dinilai merendahkan dan mendelegitimasi kerja jurnalistik yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

> Penghakiman melalui pidato tanpa bukti justru melemahkan martabat lembaga hukum di bawah kepemimpinannya sendiri.”

Yang lebih mengkhawatirkan, YLBHI menginggatkan bahwa ucapan presiden memiliki akibat politik karena disampaikan dengan kewibawaan jabatan. Aparat, pejabat, dan pendukung pemerintah dapat merasa memperoleh pembenaran moral untuk mengawasi, mengintimidasi, memperkusi secara digital, bahkan mengkriminalisasi mereka yang dicap *Londo ireng*.

Dampak ketiga adalah pembelahan sosial dan erosi kohesi nasional. Istilah yang sarat muatan historis-psikologis itu membangkitkan memori kolektif tentang trauma pengkhianatan masa penjajahan, lalu memberi label masyarakat ke dalam kubu ”nasionalis” dan ”antek asing”.

Dalam kerangka fungsionalisme Talcott Parsons, retorika semacam itu merusak fungsi integrasi sistem sosial. Alih-alih memperkuat kesadaran kolektif demi harmoni, pidato presiden justru menetapkan batas moral yang eksklusif dan memecah belah.

Ada pula ironi genealogis yang disorot publik. Misalnya, penelusuran sejarah mencatat, leluhur Presiden Prabowo dari garis ibu, Benjamin Thomas Sigar, adalah kapiten Pasukan Tulungan Minahasa yang membantu Belanda dalam Perang Jawa (sebuah fakta yang, jika definisi *Londo ireng* diterapkan secara harfiah, justru berbalik mengenai silsilahnya sendiri).

Legitimasi

Pers dan kelompok kritis sesungguhnya menjalankan fungsi *checks and balances*. Sejak Montesquieu merumuskan pemisahan kekuasaan, teori demokrasi modern memahami bahwa kekuasaan yang tak diawasi cenderung korup. Karena itu, pers ditahbiskan sebagai pilar keempat (*the fourth estate*) yang mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi transparansi dan akuntabilitas.

Kritik jurnalis, akademisi, dan LSM bukanlah permusuhan terhadap negara, melainkan mekanisme koreksi agar kekuasaan berjalan sesuai dengan konstitusi. Pemerintah justru memerlukan kritik-kritik semacam itu untuk perbaikan dan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan berikutnya. Jika 67 ribu sekolah telah diperbaiki, tetapi masih ada yang rusak, foto sekolah rusak adalah data lapangan yang berharga bagi evaluasi program, bukan sabotase asing.

Lebih jauh, pemerintah memerlukan legitimasi dan kepercayaan masyarakat yang secara teoretis dan faktual akan memperkuatnya. Max Weber mengajarkan, kekuasaan yang stabil bersandar pada legitimasi, bukan paksaan. Dalam negara hukum, legitimasi tindakan pemerintah harus berdiri di atas pembuktian hukum yang sah, bukan asumsi atau pelabelan di ruang publik.

Presiden memegang instrumen intelijen dan penegak hukum. Jika benar ada warga yang menjadi antek asing, negara punya perangkat untuk membuktikannya di pengadilan. Penghakiman melalui pidato tanpa bukti justru melemahkan martabat lembaga hukum di bawah kepemimpinannya sendiri.

Pernyataan kepala negara memang tidaklah netral. Secara teoretis, kata-kata pemegang otoritas mengandung kekuasaan simbolis (*symbolic power*) dalam pengertian Pierre Bourdieu. Artinya, kemampuan menamai dan mengklasifikasi oleh seorang kepala negara dapat membentuk realitas sosial.

Teori pelabelan Howard S. Becker mengingatkan, label dari figur otoritas dapat mengubah cara masyarakat memandang identitas dan legitimasi sebuah kelompok secara keseluruhan. Sementara Robert Entman menunjukkan bagaimana pembingkaian (*framing*) menyederhanakan realitas politik yang kompleks melalui pemilihan diksi dan sudut pandang. Ketika tiga mekanisme itu bekerja serentak dari mimbar kepresidenan, *Londo ireng* berhenti menjadi sekadar guyonan sejarah. Ia menjadi tindakan politik yang mendefinisikan siapa kawan dan siapa pengkhianat di republik ini.

Kehormatan seorang pemimpin, sebagaimana falsafah Nusantara, diukur dari kebijaksanaan lisan dan keberanian mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan rakyat.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan dirinya tidak antikritik. Baik.

Namun, pertanyaannya kini menggantung di ruang publik. Jika kritik memang dibutuhkan untuk perbaikan, mengapa para pengkritik harus dicap dengan diksi pengkhianat? Siapa yang akan berani bersuara jika harga sebuah kritik adalah stigma *Londo ireng*? (*)

Proses Redaksi



1. Penulis

- Naskah dikirim ke e-mail Opini
- Identitas: Nama, Judul



2. Kurasi

Mengajukan 3-5 judul artikel per hari ke sidang redaksi



3. Sidang Redaksi

- Diskusi konten
- Penentuan konten



4. Publikasi

- Editing
- Layout

e-mail: opini_jp@jawapos.co.id

Kelengkapan Naskah



Panjang : 650-750 kata



Format: MS Word
(tidak disarankan PDF)



Menyertakan foto KTP dan foto wajah (dalam lampiran e-mail)



Artikel yang tidak terbit setelah 6 hari pengiriman dianggap kembali ke penulis



Nilai Opini

1



Aktual

2



Relevan bagi Publik

3



Otoritas Penulis

4



Struktur

5



Bahasa Populer

1. Aktual



- Mempunyai kaitan dengan persoalan yang sedang dibicarakan masyarakat.



- Biasanya berupa berita utama dan isu viral di media sosial.

Pembaca koran ingin memahami:



"Apa yang sedang terjadi?"

Opini membantu menjawab:



- Apa arti peristiwa itu?



- Mengapa itu penting?



- Apa yang seharusnya dilakukan?

Materi Aktual



1. Peristiwa Baru

Kejadian yang baru saja terjadi.

Peristiwa:
Banjir Besar Melanda Kota

Masalah:
Banjir dan Lemahnya Tata Lingkungan



2. Kebijakan Baru

Kebijakan baru pemerintah soal:

- ekonomi
- pendidikan
- kesehatan, dll

Opini bisa mengulas:
Apa konsekuensi kebijakan tersebut?



3. Data Baru

Aktualitas bisa muncul dari data baru tentang: tingkat inflasi pengangguran, kemiskinan, dll

Misalnya: Pengangguran anak muda meningkat.

Masalah: Kenapa pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja makin berjarak?

4. Perdebatan Ramai

Kadang sebuah isu menjadi aktual karena diperdebatkan masyarakat.


Kenaikan UKT


Pembatasan BBM subsidi


Penggunaan AI di kampus


Kenaikan pajak



MBG, dll

5. Masalah lama kembali muncul

Masalah lama bisa menjadi aktual ketika:


Kasus serupa terjadi lagi


Muncul korban baru

Misalnya:


Korupsi


Keracunan MBG

Mengapa kasus yang sama terus berulang?

2. Relevan bagi Publik



Opini koran bukan jurnal pribadi.



- Persoalan harus mempunyai konsekuensi terhadap masyarakat.

Contoh:



Saya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. (Masalah pribadi)



Banyak pasien yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. (Masalah umum)

Tulisan menjadi: Sistem JKN Mobile masih menimbulkan antrean pasien.



3. Otoritas Penulis

Kompetensi harus sinkron dengan masalah yang ditulis.

Sumber Otoritas Penulis

A. Pendidikan/Keahlian Akademik

- Dosen ekonomi → Masalah ekonomi



- Dosen hukum → Masalah hukum



- Dosen politik → Masalah politik



- dll



B. Pengalaman Profesional



Seorang dokter yang bertahun-tahun menangani pasien berkompeten berbicara tentang layanan kesehatan.



Seorang kepala sekolah selama 20 tahun memiliki otoritas untuk membahas manajemen sekolah.

C. Pengalaman Lapangan



Contoh:

Dosen pendidikan meneliti dan mendampingi sekolah selama bertahun-tahun.

Maka tulisannya tidak hanya:
“Menurut teori...”

Tetapi bisa mengatakan:
’’Dalam beberapa tahun mendampingi sekolah di daerah, saya melihat persoalan yang sama berulang: kebijakan berubah lebih cepat daripada kemampuan sekolah beradaptasi.”

D. Riset dan Data



Dosen mempunyai otoritas karena:

- melakukan penelitian
- menguasai data
- memahami metodologi
- mempunyai temuan yang relevan

Contoh:
Dosen ekonomi memiliki penelitian mengenai: dampak kenaikan harga pangan terhadap rumah tangga miskin.

Ketika ada isu kenaikan harga beras, ia memiliki modal kuat untuk menulis.

4. STRUKTUR OPINI



1. Pembuka/Lead

- Langsung ke masalah.
- Bisa berupa data, fakta mengejutkan, atau peristiwa aktual



2. Tesis

- Pernyataan sikap/argumen utama
- Menolak/mendukung



3. Argumentasi

- Data
- Analisis
- Contoh kasus
- Rujukan ilmiah



4. Solusi

- Konkret dan realistis
- Berbasis keilmuan



5. Penutup

- Menguatkan tesis
- Bisa berupa ajakan atau penegasan





1. Pembuka/Lead

Pembuka berupa:



- Data 
- Fakta/peristiwa aktual
- Kontradiksi atau ironi 

Contoh:



Rupiah kembali tertekan. Nilai tukar yang melemah membuat harga barang impor ikut terancam naik. Bagi masyarakat, pelemahan rupiah bisa menggerus daya beli.






Rupiah melemah → 
biaya impor naik → 
harga barang bisa ikut naik → 
daya beli masyarakat melemah

Kesalahan umum:
Membuka opini dengan definisi.



Contoh:

”Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia. Dalam perekonomian, nilai tukar memiliki peranan penting...”



2. Tesis



Tesis adalah gagasan utama atau sikap yang ingin dibuktikan sepanjang tulisan.

Tesis yang baik biasanya:

- Jelas, tegas
- Tidak terlalu panjang
- Bisa dibuktikan dengan argumentasi
- Bisa diperdebatkan

Contoh:



Pelemahan rupiah tidak cukup diatasi dengan intervensi pasar valuta asing. Pemerintah perlu memperkuat fundamental ekonomi, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ekspor bernilai tambah.



Ada dua bagian:

a. Masalah

Pelemahan rupiah tidak cukup diatasi dengan intervensi pasar.



b. Sikap

Pemerintah harus memperkuat fundamental ekonomi.



Perbandingan Kekuatan:



Kurang kuat:

Pelemahan rupiah merupakan persoalan yang penting bagi perekonomian.



Kuat:

Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menjaga rupiah di pasar. Penguatan nilai tukar harus berjalan bersama perbaikan fundamental ekonomi.

3. Argumentasi

Argumentasi/analisis adalah jantung opini. Penulis **membuktikan** bahwa **tesisnya bukan** sekadar pendapat pribadi.



- **Logis:**
  Tidak mengandung kesalahan berpikir atau bias.



- **Berdasar Bukti:**
  Bisa dibuktikan dengan data empiris.

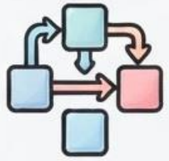

- **Relevan:**
  Memiliki hubungan dengan klaim yang diajukan

Jenis Bukti:



1. Bukti Empiris:
Hasil penelitian, eksperimen, atau observasi ilmiah.



2. Statistik:
Angka atau data kualitatif yang mendukung tesis.



3. Pendapat Ahli:
Kutipan dari pakar atau sumber rujukan lain.



4. Studi Kasus:
Contoh nyata peristiwa yang telah terjadi.

Argumentasi

Klaim: Pajak kendaraan bermotor harus dinaikkan untuk mengurangi kemacetan di jalan.



1. Studi Kasus

Ketika pemerintah Kota London menerapkan biaya kemacetan (*congestion charge*) pada 2003, volume lalu lintas di kawasan kota tersebut turun sekitar 15 persen pada tahun pertama, sedangkan tingkat kemacetan turun sekitar 30 persen.



2. Data Statistik

Fenomena itu relevan dengan persoalan di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta, misalnya, berdasar data BPS, jumlah kendaraan bermotor meningkat dari sekitar 25,26 juta unit pada 2021 menjadi 26,37 juta unit pada 2022.



3. Analisis

Prinsip ekonomi transportasi menunjukkan bahwa perubahan biaya perjalanan dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Namun, kebijakan itu harus berjalan bersama perbaikan transportasi publik. Masyarakat akan sulit diminta meninggalkan kendaraan pribadi jika bus dan kereta belum nyaman, aman, dan terjangkau.

4. Solusi

1. Solusi harus menjawab akar masalah



Terlalu dangkal:

Pemerintah perlu menambah ruas jalan agar kemacetan berkurang.



Lebih menyentuh akar masalah:

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dengan memperbaiki kualitas transportasi umum, memperluas jaringan angkutan massal, dan membuat perjalanan dengan transportasi publik lebih murah serta nyaman.

2. Solusi harus konkret, bukan normatif



Normatif:

Pemerintah harus lebih serius mengatasi kemacetan.
(Secara gagasan benar, tetapi tidak memberikan sesuatu yang bisa dikerjakan).



Lebih konkret:

Pemerintah perlu memperbanyak armada bus, memperbaiki ketepatan waktu, memperluas jalur terintegrasi, dan menyediakan tarif yang terjangkau agar masyarakat memiliki alasan kuat meninggalkan kendaraan pribadi.

5. Penutup

Penutup adalah tempat penulis mengunci seluruh argumentasi yang sudah dibangun



1. Menegaskan kembali tesis

Contoh: Masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadi kalau ada alasan yang lebih kuat, yakni transportasi publik benar-benar layak.



2. Menyimpulkan inti argumentasi

Contoh: Lingkungan membaca yang belum tumbuh menjadi persoalan besar dalam rendahnya minat baca anak. Karena itu, membangun budaya baca harus dimulai dari rumah, sekolah, hingga ruang publik.



3. Menguatkan solusi

Contoh: Banjir tidak akan selesai dengan memperbesar pompa setiap kali hujan datang. Kota membutuhkan tata ruang yang memberikan tempat bagi air, tidak terus-menerus mengambil ruang tersebut untuk beton.



4. Memberikan seruan/dorongan

Contoh: Sekolah harus berhenti menganggap kekerasan sebagai kenakalan biasa. Setiap kasus yang dibiarkan hanya mengajarkan satu hal kepada korban: bahwa keselamatan mereka tidak cukup penting untuk diperjuangkan.



5. Menghadirkan konsekuensi

Contoh: Dari setiap rupiah yang dicuri, ada ruang kelas yang tak kunjung diperbaiki dan layanan kesehatan yang tak meningkat. Jika korupsi dibiarkan, kepercayaan publik akan terus menurun.



6. Menggunakan pertanyaan retoris

Contoh: Jika sekolah mengajarkan kejujuran tetapi praktik pendidikan masih membiarkan kecurangan, nilai apa sebenarnya yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak?

Bahasa Populer



Bahasa populer dalam opini adalah bahasa **yang akrab bagi pembaca umum, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tetapi tetap bernas dan berbasis pengetahuan.**



Dosen memiliki keunggulan berupa pengetahuan akademik. **Tantangannya adalah mengubah bahasa akademik menjadi bahasa publik.**



Tidak berarti tulisan opini harus “menurunkan” kadar keilmiahan. Yang diubah adalah cara menyampaikan ilmu.



Prinsip Bahasa Populer



1. Jelas



2. Efisien



3. Logis

1. JELAS



Sekali baca, pembaca paham



Bahasa opini harus langsung menyampaikan gagasan. Hindari istilah akademik yang sebenarnya bisa diganti dengan kata sehari-hari.

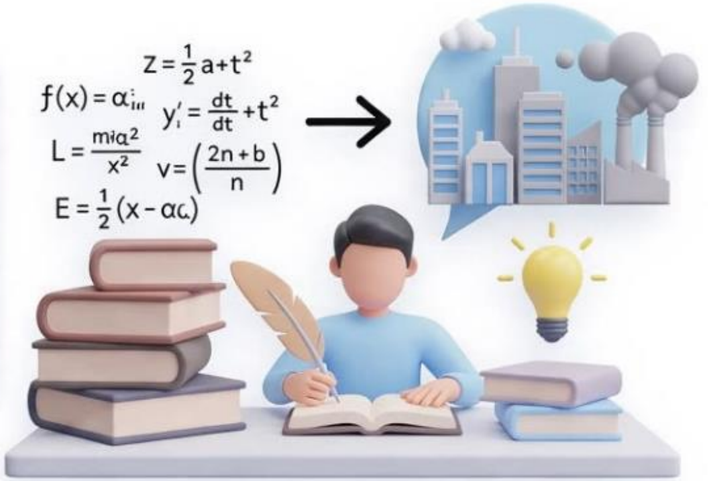

Contoh tema: Polusi udara

Terlalu akademik:

Peningkatan konsentrasi partikulat di kawasan urban merupakan konsekuensi dari kompleksitas aktivitas antropogenik yang berimplikasi terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Bahasa populer:

Udara kota semakin kotor. Asap kendaraan, industri, dan pembakaran terbuka ikut memperburuk kualitas udara yang setiap hari kita hirup.

Lebih mudah dipahami karena menggunakan kata yang konkret: udara, kota, kendaraan, industri, pembakaran.

2. Efisien

Sedikit kata, kuat makna.



Contoh **tidak efisien:**



Pada kondisi dan situasi seperti yang kita hadapi pada saat sekarang ini, persoalan polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah

Efisien:



Polusi udara di kota-kota besar harus menjadi perhatian serius pemerintah.



(Lebih pendek. Maknanya tidak berkurang.)

Opini koran memiliki ruang terbatas. Karena itu, setiap kalimat harus berisi pokok pikiran baru.





Prinsipnya:
Jangan menumpuk kata ketika satu kata sudah cukup



Misalnya:

- **melakukan upaya →** mengupayakan
- **memberikan solusi →** menyelesaikan
- **dalam rangka mengurangi →** untuk mengurangi
- **mempunyai dampak terhadap →** berdampak pada

3. Logis



Gagasan mengalir, tidak melompat.



Opini bukan sekadar kumpulan fakta, masalah, dan teori.



Semua harus disusun menjadi satu rangkaian jalan pikiran yang runtut.

Contoh: 

Polusi udara menjadi masalah di kota besar. Indonesia memiliki banyak kendaraan bermotor. Pemerintah membangun transportasi publik. Industri juga menghasilkan emisi. Masyarakat membutuhkan udara bersih. Kualitas udara perlu diperbaiki.

Lebih Logis:

Kota-kota besar menghadapi persoalan kualitas udara yang semakin kompleks. Kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber emisi. Industri dan pembakaran terbuka juga ikut menyumbang pencemaran.

Masalahnya bukan sekadar udara yang terlihat buruk. Polusi membawa dampak pada kesehatan dan meningkatkan beban masyarakat. Karena itu, kebijakan pengendalian polusi tidak cukup berhenti pada pemantauan kualitas udara.

Tema-Tema 2026

1	Pendidikan	14,5%	
2	Ekonomi	12,1%	
3	Politik & pemerintahan	9,4%	
4	Sosial	8,2%	
5	Hukum	8,2%	
6	Budaya, media	7,8%	
7	Kesehatan	7,4%	
8	Teknologi	7,0%	
9	Internasional	6,6%	
10	Agama	6,2%	
11	Infrastruktur, transportasi	5,1%	
12	Lingkungan, energi	4,7%	
13	Olahraga	1,6%	
14	Sejarah, kebangsaan	1,2%	



Kekurangan Umum Penulis:

- Terlalu akademis (seperti jurnal)
- Tidak punya sikap (netral)
- Terlalu banyak teori (minim konteks)
- Tidak aktual (topik sudah basi)
- Tidak fokus (melebar)

Modal Kuat Dosen:

- Teori/ilmu
- Hasil riset
- Data
- Pengalaman lapangan
- Kemampuan menganalisis

Jati Diri

Badak Terusir Tambang?

RENCANA pemindahan (translokasi) badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo menjadi perbincangan beberapa hari terakhir. Dalihnya, menyelamatkan satwa endemik itu dari ancaman bencana alam.

Namun, di balik wacana tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar: Mengapa badak yang harus angkat kaki dari habitatnya, bukannya ancaman terhadap habitat itu yang disingkirkan?

Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Eksplorasi tambang diduga menjadi salah satu pendorong di balik gagasan "penggusuran" satwa langka tersebut. Apalagi, beredar peta kawasan perairan di sekitar TNUK yang telah ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP). Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan Menteri ESDM yang ditandatangani 12 Februari 2026.

Wacana pemindahan itu bermula dari pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, 12 November 2026. Dia mengusulkan pemindahan badak jawa ke Alas Purwo dengan alasan menyelamatkannya dari ancaman kepunahan. Kawasan Ujung Kulon disebut berpotensi terdampak bencana alam, termasuk tsunami akibat peningkatan aktivitas Anak Gunung Krakatau.



DEDHIE RIHADI/AU/JAWA POS

Alasan keselamatan tentu tidak bisa diabaikan. Namun, jika ancaman bencana dijadikan dasar pemindahan, pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana ancaman lain terhadap kawasan tersebut ditangani. Jangan sampai badak dipindahkan atas nama konservasi, sementara pintu bagi kepentingan ekonomi justru dibuka lebar.

Badak Jawa bukan barang inventaris yang bisa dipindah lokasi ketika dianggap tidak lagi sesuai dengan rencana. Populasinya diperkirakan hanya sekitar 80 ekor. Memindahkan satwa dengan jumlah sekecil itu bukan perkara sederhana. Perubahan habitat, kondisi lingkungan, hingga proses adaptasi dapat membawa risiko serius bagi kelangsungan hidupnya.

Translokasi semestinya menjadi pi-

Rahasia PKT dalam Mempertahankan Vitalitas di Tengah Kekuasaan Jangka Panjang

Pengawasan Rakyat dan Reformasi Diri



Ye Su
Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya

PARTAI politik merupakan elemen inti dalam kehidupan politik negara modern. Sejak saya bertugas di Surabaya, rekan-rekan dari berbagai kalangan di wilayah kerja konsuler kerap mengajukan pertanyaan: Sebagai partai besar yang telah lama berkuasa, mengapa Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara konsisten mendapat dukungan rakyat? Bagaimana PKT memimpin Tiongkok hingga menciptakan dua keajaiban, yakni pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang?

Menurut saya, untuk memahami Tiongkok masa kini, kita harus terlebih dahulu memahami PKT.

Bulan lalu, Sidang Pleno Ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Ke-20 diselenggarakan di Beijing. Sidang yang sangat penting ini berlangsung pada momen peringatan 105 tahun berdirinya PKT serta pada saat Tiongkok memasuki tahap awal pelaksanaan Rencana Lima Tahun Ke-15. Dalam sidang tersebut ditinjau dan disahkan Keputusan Komite Sentral PKT tentang sejumlah isu untuk terus mendorong pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat, yang secara sistematis merangkum pencapaian besar dan pengalaman berharga dalam pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat pada era baru, menyusun pengaturan menyeluruh untuk terus memajukan upaya tersebut.

Hal itu tidak hanya memberikan jaminan politik yang kukuh bagi kemajuan modernisasi ala Tiongkok, tetapi juga membuka jendela penting dan memberikan pelajaran bermanfaat bagi berbagai negara untuk mengamati dan mempelajari "tata kelola PKT" serta "tata kelola Tiongkok". Saya bersedia menguraikan dua rahasia PKT dalam mempertahankan vitalitas di tengah kekuasaan jangka panjang kepada sahabat-sahabat Indonesia.

I. Menerima Pengawasan Rakyat

Dalam kunjungan ke berbagai pemerintah daerah di wilayah kerja konsuler, saya mengetahui bahwa kantor para pemimpin di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa di Indonesia biasanya disebut "pendopo", capaian bersejarah dan perubahan bersejarah dalam karier partai dan negara sehingga memperoleh dukungan tulus dari semua anggota partai dan rakyat di seluruh negeri. PKT secara sadar menjalankan prinsip dasar mengabdi sepenuh hati kepada rakyat dan tidak memiliki kepentingan khusus bagi dirinya sendiri. Inilah sumber keberanian dan landasan kepercayaan diri partai untuk menerima pengawasan rakyat. Semua lembaga

> Menggabungkan secara erat penerimaan terhadap pengawasan rakyat dengan keberanian melakukan reformasi diri merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan ..."

negara di setiap tingkatan, termasuk pemerintah, pengadilan, dan kejaksaan, dinamakan dengan kata "rakyat", yang berpegang pada prinsip kekuasaan negara milik rakyat dan pengawasan rakyat merupakan bagian yang semestinya dalam menguji kinerja pemerintah.

Dari sisi penyelenggaraan kekuasaan, Kongres Rakyat Nasional bertanggung jawab membahas dan memutuskan urusan penting kenegaraan serta mengawasi pekerjaan pemerintah. Para perwakilan rakyat berasal dari berbagai daerah, suku bangsa, dan industri. Setiap tahun selama "Sidang Dua Sesi", mereka turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan penelitian dan menghimpun pendapat. Dalam proses penyusunan Rencana Lima Tahun Ke-15, sebanyak 1.020 perwakilan Kongres Rakyat Nasional melakukan 60 kali kegiatan penelitian dan menghasilkan 50 laporan, sehingga "suara masyarakat dari depan rumah" dapat disampaikan langsung kepada lembaga legislatif tertinggi negara.

Dari sisi refleksi opini masyarakat, Tiongkok menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat dan mengikuti perkembangan zaman demi membangun dan menyempurnakan saluran layanan publik. Layakan suatu mata rantai kelembagaan yang dapat dilaksanakan, ditelusuri, dan dimintai pertanggungjawaban. Sistem ini sepenuhnya menjamin hak rakyat untuk mengetahui, berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan pengawasan. Hal ini mencerminkan bahwa rakyat menjadi tuan atas negaranya sendiri. Menurut hasil laporan perusahaan survei ternama Amerika Serikat yang bernama Edelman pada 2023, tingkat kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintah mencapai 89 persen. Angka ini menempati posisi teratas di antara negara-negara yang disurvei selama beberapa tahun berturut-turut, jauh di atas tingkat rata-rata sebesar 52 persen.

II. Berani Melakukan Reformasi Diri

Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping menunjukkan bahwa pengawasan terhadap diri sendiri merupakan persoalan sulit yang dihadapi seluruh negara, sekaligus menjadi "Konjektur Goldbach dalam tata kelola negara". Sebagai inti kepemimpinan dalam revolusi, pembangunan, dan reformasi Tiongkok, melalui mempelajari pola perkembangan dan perubahan politik kepartaian di dunia serta menyerap pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan berbagai negara dan partai besar, PKT telah memperdalam pemahaman terhadap hukum-hukum tata kelola sebuah partai komunis dan membuka babak baru reformasi diri dalam sebuah partai berusia seabad.

Reformasi diri berarti berani melakukan introspeksi terhadap diri sendiri secara mendalam, berani menghadapi masalah dan kesalahan secara langsung, menyelesaikan masalah ketika



MAHESA INDRA/AU/JAWA POS

an makan yang melanggar ketentuan, serta pemborosan dan kemewahan.

Terobosan dalam menangani persoalan-persoalan konkret satu demi satu mendorong penyelesaian masalah secara lebih luas sehingga terjadi perubahan mendalam dalam iklim Partai dan pemerintahan.

Kedua, konsisten mengelola partai berdasar sistem dan peraturan. Memperkuat pembangunan sistem peraturan internal partai merupakan strategi jangka panjang sekaligus langkah mendasar dalam mendorong pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat. Hingga Desember 2025, dari 3.372 peraturan internal partai yang masih berlaku di seluruh partai, sekitar 80 persen di antaranya ditetapkan atau direvisi sejak Kongres Nasional Ke-18 PKT. Dalam pengelolaan dan penempatan kader, ditetapkan ketentuan bahwa pejabat pimpinan, terutama pejabat tingkat tinggi, harus memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput serta pejabat partai dan pemerintah harus menghindari keterlibatan dalam urusan yang menyangkut kepentingan kerabatnya.

Dalam pengambilan keputusan, prinsip sentralisme demokratis diterapkan untuk mencegah keputusan sepihak dan tindakan sewenang-wenang oleh individu. Dalam pengelolaan dana fiskal dan sumber daya publik, dibangun dan disempurnakan mekanisme audit, pemeriksaan dan pengawasan, guna mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ketiga, memberantas korupsi dengan sikap tanpa toleransi. Sama seperti negara-negara lain di dunia, korupsi merupakan risiko, ancaman, dan tantangan terbesar yang dihadapi PKT. Partai senantiasa bersikap tanpa toleransi terhadap korupsi, dengan intensitas dan hasil pem-

dan mempertahankan vitalitasnya di tengah kekuasaan jangka panjang. Hal itu menyumbangkan kebijaksanaan Tiongkok dan menawarkan solusi Tiongkok bagi pembentukan peradaban politik kepartaian umat manusia dalam bentuk baru.

Menatap masa depan, PKT akan berpedoman pada semangat Sidang Pleno Ke-5 Komite Sentral ke-20, menjadikan pengelolaan partai secara menyeluruh dan ketat sebagai strategi jangka panjang dan agenda

Jati Diri

Upah Bertambah, Harga Barang Tak Mau Kalah

PEKERJA setiap tahun menerima kenaikan gaji, tetapi tetap harus mengencangkan ikat pinggang. Kesejahteraan mereka terus tertinggal. Penyebabnya, harga kebutuhan hidup berlari lebih kencang daripada kenaikan upah.

Itulah tantangan di balik penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Sejumlah daerah mencatat kenaikan cukup tinggi. Bali, misalnya, menaikkan UMP hingga 42,15 persen menjadi Rp 4,5 juta. Jawa Barat juga menaikkan upah 29,44 persen menjadi Rp 3 juta. Namun, kenaikan di sejumlah daerah lain jauh lebih tipis. Sumatera Utara hanya menetapkan kenaikan 5,61 persen, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) 5,97 persen.

Perbedaan itu memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum belum menghasilkan pemerataan perlindungan bagi pekerja. Memang, setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, struktur industri, dan kemampuan usaha yang berbeda. Karena itu, besaran kenaikan UMP tidak harus seragam. Tetapi, perbedaan kon-



DEDHIE RIHADI/AI/JAWA POS

disi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pekerja di daerah tertentu makin jauh dari standar hidup layak.

Pemerintah perlu menguji kembali keberpihakan kebijakan pengupahan. Sebab, kenaikan upah secara nominal belum tentu identik dengan kenaikan kesejahteraan. Misalnya, kenaikan harga beras yang melampaui 7 persen saja sudah berpotensi menggerus daya beli pekerja yang upahnya hanya naik sekitar 5 persen. Belum lagi kenaikan harga minyak goreng, cabai, tepung, dan kebutuhan lain.

Persoalan pengupahan juga tidak

Harmonisasi Investasi dan Pertanian untuk Masa Depan Ngawi

Merawat Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan



H Ony Anwar Harsono, ST, MH
Bupati Ngawi

BAGI saya, arah pembangunan Kabupaten Ngawi harus bertumpu pada dua kekuatan utama yang berjalan beriringan, yakni pertumbuhan investasi dan penguatan sektor pertanian. Keduanya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sementara pertanian menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan Ngawi tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Dari sisi investasi, perkembangan ekonomi Kabupaten Ngawi menunjukkan peluang yang semakin besar. Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1,9 triliun dari target Rp 2 triliun. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi daerah. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan target investasi sekitar Rp 3,1 triliun. Hingga 15 Juli 2026, realisasinya telah mencapai Rp 1,08 triliun. Target yang meningkat ini menunjukkan optimisme terhadap perkembangan ekonomi sekaligus tantangan untuk menghadirkan investasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, di tengah dorongan peningkatan investasi tersebut, Ngawi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga posisinya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Sektor pertanian tidak boleh ditempatkan sebagai urusan yang berjalan sendiri, apalagi harus mengalah demi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Justru, keberhasilan pembangunan harus memastikan peningkatan investasi berlangsung sejalan dengan penguatan produksi pangan.

Komitmen tersebut tercermin dalam target pertanian yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ngawi 2025–2029, produksi padi diproyeksikan mencapai 895.117 ton gabah kering giling (GKG) pada 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari sasaran peningkatan produksi secara bertahap hingga mencapai 899.331 ton GKG pada 2029. Sementara itu, Kementerian Pertanian menetapkan target luas panen padi Kabupaten Ngawi sebesar 169.000 hektare pada 2026. Pemerintah juga mendorong peningkatan

> Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan semestinya berjalan bersama, saling menguatkan untuk masa depan daerah yang lebih sejahtera.''

Indeks Pertanaman hingga 2,8 untuk mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia.

Dua target tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Ngawi memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersamaan. Di satu sisi, investasi ditargetkan mencapai Rp 3,1 triliun. Di sisi lain, produksi padi harus terus diperkuat. Bagi saya, keduanya bukan target yang saling bersaing, melainkan dua ukuran kemajuan daerah yang saling melengkapi. Pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas apabila ditopang sektor pertanian yang kuat, begitu pula pertanian akan semakin maju apabila memperoleh dukungan investasi dan teknologi.

Peningkatan investasi seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian. Ngawi memiliki potensi mengembangkan industri pengolahan hasil panen, industri pangan, pergudangan, hingga distribusi komoditas pertanian. Kehadiran kegiatan usaha tersebut dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar hasil panen, dan membuka lapangan kerja. Dengan demikian, investasi tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat rantai usaha pertanian dari hulu hingga hilir.

Pada saat yang sama, pencapaian target produksi padi membutuhkan dukungan investasi pada infrastruktur dan teknologi pertanian. Ketersediaan irigasi, jalan usaha tani, benih berkualitas, alat dan mesin pertanian, serta akses pemasaran harus menjadi perhatian. Produktivitas perlu ditingkatkan agar target produksi tercapai tanpa harus terus-menerus mengandalkan perluasan lahan. Petani juga perlu memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan kepastian pasar agar kegiatan pertanian semakin menguntungkan.

Karena itu, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan investasi. Salah satu instrumen strategisnya adalah perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk menjaga keberadaan sawah produktif dari ancaman alih fungsi. Sawah bukan sekadar ruang produksi, melainkan aset strategis yang menentukan keberlanjutan ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat. Penetapan dan pengendalian pemanfaatan LSD harus menjadi perhatian dalam setiap perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan kawasan industri dan kegiatan usaha. Pemerintah daerah perlu memastikan investasi diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan tidak mengorbankan sawah produktif. Kepastian berusaha bagi investor harus berjalan beriringan dengan kepastian perlindungan bagi petani.

Saya memandang keberhasilan pembangunan Ngawi harus terlihat dari dua capaian sekaligus: meningkatnya nilai investasi dan terjaganya produktivitas pertanian. Investasi Rp3,1 triliun akan lebih bermakna apabila mampu membuka kesempatan kerja, menggerakkan usaha lokal, menyerap tenaga kerja daerah, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Begitu pula target produksi 895.117 ton GKG akan lebih berarti apabila diikuti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Upaya mencapai kedua target tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus memastikan pertumbuhan investasi tidak mengurangi kemampuan daerah dalam memproduksi pangan. Sebaliknya, sektor pertanian harus memperoleh ruang untuk berkembang melalui inovasi, kemitraan usaha, dan pemanfaatan teknologi.

Pada akhirnya, Ngawi harus mampu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan. Target investasi dan target pertanian bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan komitmen pembangunan yang harus diwujudkan bersama. Saya ingin Ngawi menjadi daerah yang semakin menarik bagi investasi, semakin kuat produksi pangannya, terlindungi lahan sawahnya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Sebab, kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang seberapa kuat daerah menjaga sumber kehidupan masyarakatnya. **(*)**



DEDHIE RIHADI/AI/JAWA POS

Soekarno dan Tan Malaka: Dua Pahlawan, Satu Republik



Djarot Saiful Hidayat
Pembina Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945

SETIAP November, bangsa ini mengheningkan cipta memperingati Hari Pahlawan. Namun, ingatan sejarah kita hampir selalu digiring pada narasi seremonial dan heroisme fisik semata. Kita kerap abai bahwa sebelum bedil meletus di medan pertempuran, ada lentera gagasan yang lebih dahulu menyala. Republik ini lahir dari kepala kaum intelektual yang berani membayangkan sesuatu yang belum ada, lalu siap menanggung akibat paling fatal dari bayangan itu.

Di antara para bapak bangsa, Tan Malaka menempati posisi tragis. Jika Soekarno dirayakan sebagai proklamator di puncak kekuasaan, Tan Malaka –yang menulis cetak biru republik jauh sebelum merdeka– justru menghabiskan mayoritas hidupnya sebagai pelarian politik.

Ironisnya, pada 28 Maret 1963, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional lewat Keppres No 53/1963 oleh sahabat sekaligus rival ideologisnya: Bung Karno. Dua tokoh raksasa itu akhirnya bertemu dalam satu daftar kehormatan. Namun, di era Orde Baru, nama Tan Malaka seolah disingkirkan dari memori kolektif karena dianggap "terlalu berbahaya" untuk diingat. Tulisan ini mengajak kita membedah gagasan kritis mereka yang relevan hingga hari ini.

Dekolonisasi Nalar dan Benturan Strategi

Jauh sebelum republik ini berdiri, Tan Malaka menulis *Naar de Republiek Indonesia* (1925), merumuskan negara merdeka yang dipimpin rakyat tanpa diskriminasi. Lewat *Massa Actie* (1926), ia membedah teori mengubah kesadaran massa menjadi energi politik terorganisasi. Puncaknya adalah *Madilog* (1943) yang mengajukan tesis tajam: bangsa yang nalarnya didominasi klenik dan mistisisme akan sangat mudah ditaklukkan. Karena itu, dekolonisasi nalar alias kemerdekaan pikiran adalah syarat mutlak sebelum kemerdekaan politik bisa diraih seutuhnya.

Dari landasan filosofis ini, lahir doktrin "Merdeka 100%". Tan Malaka menolak tegas kompromi dengan Belanda selama kedaulatan belum diakui paripurna. Analisisnya jernih: kemerdekaan yang setengah hati hanya akan mewariskan struktur ekonomi neokolonial, di mana tambang dan pabrik tetap milik asing meski bendera negara berganti.

Sementara itu, Bung Karno bertolak dari titik pragmatisme dengan tujuan serupa. Melalui *Indonesia Menggugat* (1930) dan *Mencapai Indonesia Merdeka* (1933), ia merumuskan Marhaenisme. Titik beratnya ada pada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi –demokrasi yang tak boleh berhenti di bilik suara, melainkan harus menjangkau keadilan sosial bagi rakyat. Jika Tan Malaka menekankan metode disiplin perlawanan radikal, Bung Karno adalah maestro yang tekun menjahit faksi-faksi ideologi menjadi barisan solid melawan penjajah.

Perbedaan pendekatan itu memicu drama revolusi. Saat kabinet yang didukung Soekarno memilih jalur diplomasi pada akhir 1945 demi menghindari pertumpahan darah massal, Tan Malaka merespons keras dengan menghimpun Persatuan Perjuangan (1946). Front raksasa itu menuntut pemerintah berunding hanya atas dasar "Merdeka 100%" serta menuntut penyitaan aset perkebunan dan industri musuh.

Karena dinilai mengancam stabilitas diplomasi di mata internasional, Tan Malaka akhirnya ditangkap tanpa proses pengadilan. Membaca ulang periode sejarah ini menyadarkan kita: republik yang muda kala itu sejatinya membutuhkan kelenturan diplomasi Soekarno untuk meraih simpati dunia, sekaligus tekanan radikalisme Tan Malaka sebagai bukti bahwa rakyat tak bisa dijinakkan.

> Soekarno dan Tan Malaka mewariskan satu pesan abadi: kecintaan yang mendalam pada tanah air dan keberanian berpikir radikal-kritis tidak akan pernah bertentangan."

Menggugat Ketimpangan di Era Digital

Warisan pemikiran mulia kedua tokoh itu sesungguhnya bersemayam di jantung Pasal 33 UUD 1945. Frasa "kebersamaan" menggemakan prinsip sosio-demokrasi Soekarno, sementara kata "kemandirian" adalah manifestasi hukum dari doktrin "Merdeka 100%" Tan Malaka. Namun, mari kita uji norma konstitusi ini dengan realitas data mutakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan terakselerasi 5,29 persen pada triwulan II 2026, dengan angka kemiskinan turun ke level 8,07 persen pada Maret 2026. Di atas kertas, ini adalah keberhasilan pembangunan. Namun, rasio gini (indikator ketimpangan) justru naik tipis dari 0,363 menjadi 0,368. Perputaran ekonomi juga masih sangat terpusat di Pulau Jawa yang menyumbang 56,47 persen PDB nasional. Angka-angka itu membuktikan satu dalil: pertumbuhan ekonomi makro tidak otomatis bermakna pemerataan kesejahteraan bagi kaum Marhaen.

Marhaen pada abad ke-21 pun telah berubah wujud menjadi jutaan pekerja *gig economy*: pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas. Mereka punya kendaraan sendiri, tetapi tak menguasai alat produksi digital. Jam kerja, tarif, dan nasib mereka dikendalikan sepihak oleh algoritma platform korporasi raksasa. Fakta itu menuntut intervensi kebijakan radikal yang sungguh-sungguh berpihak pada kelas pekerja bawah, bukan sekadar memanjakan oligarki bermodal.

Di ranah kognitif, ancaman "mistik" dalam teori *Madilog* kini berubah wujud menjadi algoritma media sosial, hoaks massal, dan polarisasi murahan. Bangsa yang malas menggunakan logika akan mudah diadu domba. Era digital menuntut kita bersikap skeptis, memverifikasi data, dan menolak menjadi pion industri pemecah belah persatuan.

Sintesis Gerakan Generasi Muda

Bagi generasi muda, gagasan kedua tokoh itu dapat disintesiskan menjadi panduan aktivisme riil yang solutif.

Pertama, merajut solidaritas di tengah polarisasi. Kita belajar dari Bung Karno untuk berani melintasi batas identitas politik demi memperjuangkan isu-isu esensial publik seperti krisis iklim dan pemberantasan korupsi, alih-alih terjebak dalam permusuhan elektoral sempit.

Kedua, transformasi gerakan berbasis data. Mengadopsi metode analitis Tan Malaka, gerakan anak muda saat ini tidak cukup bermodal tagar viral sesaat. Aktivisme harus dibangun dari fondasi literasi data, penguasaan naskah kebijakan publik, dan struktur organisasi yang solid.

Ketiga, merebut kedaulatan ekonomi konstitusional. Amanat Pasal 33 UUD 1945 harus terus ditagih implementasinya. Ini berarti aktif mendesak regulasi perlindungan bagi buruh *gig economy* dan memastikan keadilan ekologis ditegakkan dalam setiap proyek investasi ekstraktif di tanah air.

Hari Pahlawan paling bermakna dirayakan dengan membaca dan memperdebatkan gagasan mereka secara kritis, bukan sekadar memfosilkannya dalam buku sejarah. Republik ini bukan candi yang telah selesai dibangun lalu dibiarkan; ia adalah proyek peradaban yang terus berjalan. Kedua bapak bangsa ini mewariskan satu pesan abadi: kecintaan yang mendalam pada tanah air dan keberanian berpikir radikal-kritis tidak akan pernah bertentangan. Setiap generasi memikul tanggung jawab sejarah untuk membuktikannya. (*)



MAHESA INDRAJAU/JAWA POS

Tan Malaka, Pahlawan yang Terlalu Berbahaya untuk Diingat



Supangat
Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

HARI Pahlawan menjadi momentum untuk kembali melihat sosok-sosok yang berperan dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Tan Malaka, pemikir ulung sekaligus Pahlawan Nasional yang namanya masih kerap dikaitkan dengan ideologi kiri. Padahal, melihat Tan Malaka hanya dari satu sisi berisiko menutup kontribusi dan kompleksitas pemikirannya bagi bangsa ini.

Mengapa pemikiran seorang tokoh yang merumuskan gagasan Republik Indonesia jauh sebelum kemerdekaan belum selalu mendapat perhatian yang sepadan dalam ingatan sejarah bangsa?

Fondasi Konseptual Bangsa yang Dilupakan

Jauh sebelum Bung Karno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka telah menulis *Naar de Republiek Indonesia* pada 1925. Dalam karya tersebut, ia merumuskan gagasan tentang negara merdeka yang berdaulat penuh, berbentuk republik, dan berada di tangan rakyat. Gagasan ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap kondisi sosial-politik Hindia Belanda yang timpang dan penuh penindasan.

Dalam *Massa Actie* (1926), Tan Malaka menekankan pentingnya kesadaran massa sebagai kekuatan utama perubahan. Ia menolak pendekatan elitis yang hanya mengandalkan diplomasi atau kompromi dengan penguasa kolonial. Menurutnya, kemerdekaan sejati hanya dapat diraih jika rakyat sadar akan hak dan posisinya dalam struktur ekonomi dan politik.

Gagasan ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis dalam *Madilog* (1943), yang memperkenalkan cara berpikir materialisme, dialektika, dan logika sebagai alat untuk membebaskan bangsa dari mistisisme dan fatalisme. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga harus dimenangkan dalam cara berpikir masyarakat.

Ia juga merancang strategi perjuangan yang disebutnya sebagai "Gerpolek" (gerilya, politik, ekonomi). Strategi ini menempatkan perjuangan bersenjata sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas, yang mencakup pendidikan politik, konsolidasi massa, dan penguatan ekonomi rakyat. Dengan demikian, Tan Malaka tidak hanya dikenal sebagai pejuang di medan perang, tetapi juga sebagai perancang sistem perjuangan.

> Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia."

Pertama, penolakannya terhadap kompromi dalam merdekaan juga berarti membongkar struktur feodalisme dan kapitalisme yang meninggalkan rakyat kecil.

Ada dua aspek pemikirannya yang memperlihatkan keteguhan sikapnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perubahan sosial.

Kedua, kritik terhadap cara berpikir mistis dan feodal. Melalui *Madilog* (*Materialisme, Dialektika, Logika*), Tan Malaka berupaya mengajak bangsa untuk berpikir rasional dan ilmiah. Ia menolak penjelasan yang bersifat takhayul dan mistis, serta mendorong masyarakat untuk mencari sebab-akibat dalam setiap peristiwa.

Ketiga, strategi perjuangan yang menyeluruh. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan senjata. Ia menggabungkan perjuangan fisik dengan pendidikan politik dan penguatan ekonomi rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.

Keempat, keberanian untuk berbeda. Tan Malaka berani mengambil jalan yang berbeda dari mainstream, bahkan ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaan ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkaya perdebatan tentang arah bangsa.

Kelima, visi jangka panjang. Tan Malaka tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini dikelola setelah merdeka. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran politik sebagai fondasi negara yang kuat.

Kenapa Tan Malaka "Berbahaya"?

Istilah "berbahaya" dalam konteks ini merujuk pada pemikirannya yang radikal pada zamannya, bukan pada tindak kekerasan fisik. Sebagai penganut Marxisme yang independen, Tan Malaka berupaya mengajak bangsa untuk berpikir rasional dan ilmiah. Ia menolak penjelasan yang bersifat takhayul dan mistis, serta mendorong masyarakat untuk mencari sebab-akibat dalam setiap peristiwa.

Ketiga, strategi perjuangan yang menyeluruh. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan senjata. Ia menggabungkan perjuangan fisik dengan pendidikan politik dan penguatan ekonomi rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.

Keempat, keberanian untuk berbeda. Tan Malaka berani mengambil jalan yang berbeda dari mainstream, bahkan ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaan ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkaya perdebatan tentang arah bangsa.

Kelima, visi jangka panjang. Tan Malaka tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini dikelola setelah merdeka. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran politik sebagai fondasi negara yang kuat.

Kenapa Tan Malaka "Berbahaya"?

Istilah "berbahaya" dalam konteks ini merujuk pada pemikirannya yang radikal pada zamannya, bukan pada tindak kekerasan fisik. Sebagai penganut Marxisme yang independen, Tan Malaka berupaya mengajak bangsa untuk berpikir rasional dan ilmiah. Ia menolak penjelasan yang bersifat takhayul dan mistis, serta mendorong masyarakat untuk mencari sebab-akibat dalam setiap peristiwa.

Ketiga, strategi perjuangan yang menyeluruh. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan senjata. Ia menggabungkan perjuangan fisik dengan pendidikan politik dan penguatan ekonomi rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.

Keempat, keberanian untuk berbeda. Tan Malaka berani mengambil jalan yang berbeda dari mainstream, bahkan ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaan ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkaya perdebatan tentang arah bangsa.

Kelima, visi jangka panjang. Tan Malaka tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini dikelola setelah merdeka. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran politik sebagai fondasi negara yang kuat.

Kenapa Tan Malaka "Berbahaya"?

Istilah "berbahaya" dalam konteks ini merujuk pada pemikirannya yang radikal pada zamannya, bukan pada tindak kekerasan fisik. Sebagai penganut Marxisme yang independen, Tan Malaka berupaya mengajak bangsa untuk berpikir rasional dan ilmiah. Ia menolak penjelasan yang bersifat takhayul dan mistis, serta mendorong masyarakat untuk mencari sebab-akibat dalam setiap peristiwa.

Ketiga, strategi perjuangan yang menyeluruh. Tan Malaka memahami bahwa kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan senjata. Ia menggabungkan perjuangan fisik dengan pendidikan politik dan penguatan ekonomi rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perjuangan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial.

Keempat, keberanian untuk berbeda. Tan Malaka berani mengambil jalan yang berbeda dari mainstream, bahkan ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaan ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperkaya perdebatan tentang arah bangsa.

Kelima, visi jangka panjang. Tan Malaka tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini dikelola setelah merdeka. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, pendidikan, dan kesadaran politik sebagai fondasi negara yang kuat.

Terima Kasih

Opini
Jawa Pos